SEPUTAR KEMAJEMUKAN UMAT ISLAM*

Oleh Jhon Tafbu Ritonga

Reformasi 1998 telah menghasilkan demokrasi “ala barat”. Bahkan lebih meriah dari Pemilihan Umum (pemilu) di Amerika Serikat Karena yang dipilih langsung bukan hanya DPR(D) dan Presiden/wapres, tapi juga kepala desa, Walikota, Bupati dan Gubernur. Sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” diwujudkan dengan pemilihan langsung. Warga negara yang pintar, bodoh, buta huruf, tuna rungu, tuna netra, tuna susila, koruptor, bandit-bandit punya hak yang sama dalam menetapkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat melalui Pemilu.

Negara ini pun mendapat pujian sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sementara umat Islam sendiri proaktif menerima demokrasi “ala barat” itu dengan terbuka. Dengan hati yang lapang umat Islam menerima system pemilihan langsung. Hampir tidak ada reaksi yang signifikan, misalnya dengan memboikot Pemilu. Padahal kitab-kitab fikih (bab *khilafah*) umumnya menjelaskan bahwa pemimpin (khalifah) seharusnya dipilih oleh wakil-wakil yang memiliki sifat takwa, adil, berilmu, dan berpendirian atau berkarakter.

Di tengah pujian dan penerimaan demokrasi “ala barat” dimaksud, muncul kebimbangan melihat ekses demokrasi yang menggejala. Sekelompok cendikiawan muslim yang merasa peduli pada masa depan Indonesia sebagai bangsa dan negara berpandangan bahwa sedang muncul gerakan radikal keagamaan. Kemampuan pemerintah yang lemah menegakkan hukum dan masyarakat yang belum mampu mengorganisir dirinya dalam sebuah iklim demokrasi telah melahirkan radikalisme etnis dan agama atau gerakan ekstrim.

Salah satu gerakan ekstrim keagamaan yang merisaukan itu katanya ialah dari kelompok umat Islam. Konon ada yang melakukan aksi-aksi yang mengabaikan kenyataan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan gerakan Islam radikal yang sudah terorganisir, saya akan *sharing* dalam diskusi ini dengan mengetengahkan pengalaman pribadi membaur dengan sejumlah aktivis ormas-ormas dan gerakan-gerakan dakwah.

Sebagai seorang muslim yang merasa tidak termasuk dalam gerakan radikal dan bahkan belum bertemu dengan gerakan itu selama ini, saya ingin mengajak audiens melihat kemajemukan umat Islam di mana kita bergaul sehari-hari. Memahami kemajemukan umat (jika benar adanya gerakan radikal) perlu untuk kemudian digunakan sebagai modal dalam mengajak semua elemen bangsa membangun negara yang lemah ini adalah penting melihat fakta bahwa umat Islam terdiri dari berbagai firkah, aliran atau madzhab.

Pada masa kecil saya di desa, umat mengenal Islam melalui figur yang dipanggil Pak Lebai dan khalifah. Mereka ialah pengamal tariqat Naqsabandiyah. Pada masa itu orang-orang tua meningkatkan amal dan mutu ibadahnya dengan cara menerima tariqat. Selanjutnya mengikuti *suluk* selama 10 atau 40 hari penuh. Kitab yang memperkenalkan rukun Islam dan rukun Iman kepada orang desa popular dengan nama *kitab parrukunan.* Buku dengan aksara *Arab Melayu* itu memperkenalkan Allah SWT melalui satu *furu'* yang disebut sifat duapuluh. Anak-anak belajar membaca al-Qur'ân dengan metode *ali,f ba, ta* dalam *juz 'amma.* Apabila sudah mahir membaca dengan baik, anak laki-laki biasanya didorong ikut tadarus kampung pada malam Jum'at untuk menunjukkan kebolehan membaca dengan tajwid yang bagus.

Saya mulai mengenal kemajemukan Islam sejak kecil. Sebagaimana dimaklumi, di Indonesia umat Islam mengenal empat madzhab utama, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Keempat madzhab itu kemudian mewarnai pemikiran dan panduan teknis beribadah. Saya

---

* Paper disampaikan dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture dengan tema “Islam dan Kemajemukan di Indonesia”, di Universitas Sumatera Utara, Senin, 5 Februari 2007.

sudah merasakan nuansa madzhab ketika mais anak-anak dan remaja pada tahun 1960-an. Pada usia Sekolah Rakyat saya belajar di lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Beranjak remaja saya belajar disekolah yang dikelola oleh Nahdhatul Ulama (NU), yakni Pendidikan Guru Agama 4 tahun. Keduanya berada di satu kota kabupaten, yakni Rantau Perapat, sekitar 285 km dari Kota Medan.

Sejak masih di bangku SD hingga perguruan tinggi saya sering mendengar perdebatab atau bahkan gesekan kecil sesama umat Islam karena masalah yang disebut *khilafah*. Saya pun sering mendengar ustadz yang berpendidikan sarjana mengecam cara-cara beribadah kaum *tariqat*. Berzikir dengan cara bersuluk yang dilakukan oleh kaum sufi oleh sebagian sarjana agama disebut sebagai *bid'ah*. Pusat-pusat persulukan pun sempat meredup. Akhir-akhir ini metode yang mirip (majelis zikir) dipopulerkan melalui televisi, termasuk oleh ustadz berpendidikan sarjana.

Ketika mengurus pengajian bulanan mahasiswa di kampus yang diorganisir oleh HMI Komisariat (tahun 70-an), saya sering dengan sengaja mengundang penceramah atau ustadz yang dikenal berbasis di Muhammadiyah, NU dan al-Washliyah. Dengan harapan dapat menambah cakrawala teman-teman mahasiswa tentang keberadaan madzhab dalam Islam. Saya sendiri, dengan kekerapan bersama ustadz-ustadz kondang dari tiga ormas Islam itu mendapat pengayaan pandangan beragama.

Pada masa mengikuti pendidikan lanjutan di Universitas Kebangsaan Malaysia (akhir tahun 80-an), saya berusaha mengenal lebih dekat kawan-kawan dari berbagai aliran gerakan dakwah yang ada di sana. Mereka terdiri dari pengagum Hasan al-Banna (Ikhwanul Muslimin) yang dalam ABIM terkesan mengalami penyesuaian dengan madzhab resmi kerajaan (Syafi'i), Darul Arqam pimpinan Ustadz Ashari Muhammad, dan Jamaah Tabligh yang pada waktu itu berpusat di Masjid India, Kuala Lumpur (kabarnya sudah pindah ke Seri Petaling).

Semangat perjuangan aktivis ketiga gerakan dakwah tersebut dapat saya rasakan saat bersilaturahmi dengan aktivis dakwah yang ada di Indonesia. Ada kalanya terasa ketika berhadapan dengan aktivis tarbiah di kampus-kampus. Sementara Darul Arqam, karena tekanan politik di negara asalnya Malaysia, sudah beberapa kali melakukan perubahan "jubah perjuangan". Sedangkan Jamaah Tabligh yang senantiasa berusaha menghindari isu politik dan *khilafah* berkembang tanpa liputan media massa. Saya difahamkan bahwa ijtima' para karkun yang diadakan sekali setahun di Jawa Timur mampu menghimpun Jamaah hingga bilangan juta jiwa.

Beberapa kolega muslim yang rajin beribadah dan beramal soleh sering tak sadar ikut menyebut aktivis gerakan dakwah sebagai fundamentalis. Bahkan ada juga ustadz yang memvonis mereka sebagai golongan sesat. Sementara demokrasi telah memberi ruang yang lebih bebas bagi orang awam menilai ustadz dan ulama. Kecaman dan kritik sering pula dipublikasi oleh media secara terbuka. Akumulasi ekses prose situ ada kalanya menimbulkan respon laten dari para pengikut, sehingga menimbulkan reaksi awam yang terkesan radikal.

Dalam dialog terbuka dan informal dengan tokoh-tokoh Islam dari lingkungan Tariqat Naqsabandiyah, Muhammadiyah, NU, al-Jamiatul Washliyah, Darul Arqam, Jamaah Tabligh dan kelompok tarbiyah di kampus, sejauh ini saya belum menemukan ada tanda-tanda gerakan radikal ataupun mendorng *genocide.* Hakekat perjuangan ormas dan gerakan dakwah yang saya kenal selama ini ialah untuk meneruskan tugas Rasulullah Muhammad SAW. Mengabdi kepada Allah. Untuk menyebarkan Islam sebagai agama damai dan menyelematkan umat manusia dunia-akherat.

Pasca reformasi, muncul gerakan dakwah yang tidak puas pada penertiban hukum atas tempat maksit (judi dan perzinaan). Kegiatan mereka yang dinilai *good news* mendapat liputan media secara luas. Saya belum pernah berkomunikasi secara intansif dengan kelompok tersebut sehingga tidak bisa memberikan penilaian sebagaimana halnya dengan gerakan dakwah dan ormas Islam yang saya sebut di atas. Namun saya mendapat kesan bahwa sebenarnya kelompok tersebut sebagai orang yang merasa sangat gelisah menyaksikan fenomena kehidupan yang makin permisif pada maksiat, kian materialistic dan bahkan hedonis.

Makin terungkap bahwa demokrasi barat ternyata sarat pencitraan yang membungkus kemunafikan. Masyarakat pun kian sadar bahwa demokrasi tidak menjamin perbaikan ekonomi dan sosial. Apalagi memperbaiki kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan religiusitas. Statistik kemiskinan dan pengangguran kian parah. Kezaliman terkesan makin dikemas menjadi abu-abu. Maksiat zina, judi dan miras (arak) kian merebak terbuka dari kota besar sampai pelosok. Korupsi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Karena dianggap haram, ulama dan pimpinan ormas Islam sudah menfatwakan supaya umat ikut memberantas korupsi. Tetapi kemudian definisi korupsi menjadi kabur karena perbuatan korupsi tergantung pada peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Kesimpulannya, saya tidak melihat ada gerakan dakwah yang mendorong sikap radikal keagamaan seperti yang mengkhawatirkan sebagian cendikiawan muslim. Saya lebih yakin bahwa yang sedang terjadi ialah demokratisasi barat yang tidak pas dengan kultur bangsa Indonesia yang religius dan majemuk. Akibatnya timbul ekses yang tak bisa difasilitasi dan dikendalikan oleh system dan institusi negara.

Mengingat Indonesia sebagai bangsa yang sudah sejak *dahoeloe* kala, sementara sebagai satu negara baru lahir pada tahun 1945, dan hingga sekarang masih terus mencari bentuk, maka yang paling mendesak dilakukan sekarang ialah membangun sistem dan institusi kenegaraan yang benar dan kuat.

Dalam konteks diskusi hari ini, saya ingin menegaskan bahwa permasalahan bangsa kita bukanlah gerakan radikal keagamaan, melainkan masalah *soft state* yang disinyalir oleh Gunnar Myrdal dalam bukunya *Asian Drama*.